

Pembangunan Perdesaan Bertumpu Pada Masyarakat (AR - 6254)

MATERI KETIGA

MENUJU COMMUNITY BASED
DEVELOPMENT
YANG DAPAT DIREALISASIKAN

<http://www.ar.itb.ac.id/wdp/>

I. PENDAHULUAN

3 (tiga) Strategi konsep pengelolaan program pembangunan yaitu:

1. Pemb. berpusat pd upaya pencapaian suatu informasi kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai yg berpusat pd manusia (people centered development).
2. Pendayagunaan sumberdaya pembangunan yang berwawasan komunitas (community base resource management).
3. Pengelolaan pemb. Bertumpu pada masyarakat (community based management).

Lanjutan...

4 (empat) dasar asumsi pola pemb. perdesaan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat.
2. Pengorganisasian masyarakat.
3. Prakarsa masyarakat.
4. Swadaya masyarakat.

II. ASPEK-ASPEK CBD DAN GOOD GOVERNANCE

Aspek-Aspek CBD dlm ruang perdesaan

- Tetap berpihak dan men-
dasarkan diri pada kebutuhan
dasar masy (*basic need approach*).
- Mengembangkan inspirasi
aspirasi dan partisipasi masy.
(*battom up approach*)
- Menggerakkan dan meng-
hidupkan aktivitas ekonomi
rakyat (*prosperty approach*).

Good Governance

- Adanya kepastian hukum,
keterbukaan, profesionalisme
dan memiliki akuntabilitas.
- Menghormati hak-hak asasi
manusia.
- Dapat meningkatkan pen-
dapatan masy. dan meng-
utamakan pelayanan prima
kepada masy. tanpa diskri-
minasi.

Lanjutan....

- | | |
|--|---|
| <p>➤ Pengorganisasian dan pe-
lembagaan yang dikelola
dan menjadi tanggung
jawab dari semua masy.
sendiri (participatory app.).</p> | <p>➤ Mampu mengakomodasi
sosial masyarakat.</p> |
| <p>➤ Bantuan, bimbingan dan
pembinaan pemerintah yg
merupakan tanggung-
jawab dari semua instansi
melalui koordinasi dan
keterpaduan (cross-
sectoral approach).</p> | <p>➤ Partisipasi, aktivitas dan
desentralisasi.</p> |

Lanjutan...

➤ Pengembangan teknologi tepat guna (appropriate technology), dengan menggunakan jenis teknologi padat karya (labor intensive technology) yg produktif dan adaptif, agar mampu mengikuti perkembangan modernisasi teknologi, baik software maupun hardware (technology approach).

➤ Berkembangnya system checks dan balance.

III. Menuju CBD yang dapat direalisasikan

- Untuk mewujudkan CBD, maka harus terwujud dulu Good Governance.
- Kebijakan Otonomi Daerah sebagai jembatan mempermudah terwujudnya Good Governance
- Azas desentralisasi dalam Otonomi Daerah diyakini mampu memberikan beberapa manfaat yang positif untuk terciptanya tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi daerah

Pendapat-pendapat mengenai desentralisasi

- Desentralisasi yang demokratis menjamin terciptanya efektifitas pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat local dari pada program pembangunan yang sentralistis (Hiram S. Phili, 1963);
- Dengan desentralisasi dan otonomi daerah upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peran serta pro-aktif kelompok masyarakat miskin dapat terlaksana secara efektif (Rondinelli, 1983);
- Desentralisasi yang berwujud otonomi daerah, akses masyarakat terhadap kewenangan administrasi pemerintahan menjadi semakin dekat dan semakin terbuka (de Mello, 1981);

Lanjutan...

- Format otonomi daerah dengan kewenangan yang terdesentralisasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat yang terbuka secara luas, diyakini akan mampu meredam kecenderungan penolakan masyarakat terhadap perubahan yang ditawarkan (*Resistance to Changes*). Dengan kata lain dengan desentralisasi komitmen masyarakat untuk merubah sikap dan perilaku social, ekonomi dan politik dapat dioptimalkan karena pada dasarnya mereka sendirilah yang merencanakan, melaksanakan dan mengendalika pembangunan dengan fasilitasi dari mpemerintah daerah (Conyers, 1981);
- Dengan kondisi masyarakat yang sangat beragam, sebagaimana halnya di Indonesia, maka kebijakan desentralisasi akan mampu mengembangkan daya jangkau dan partisipasi pro-aktif berbagai kelompok masyarakat yang beragam tersebut sesuai dengan asoirasi dan latar belakang social-budaya mereka masing-masing (Henry Maddick, 1981);
- Dll.

Tabel potret pemetaan *good governance* di desa

• Elemen	Aktor	Arena	Isu Relasional
• Governance			
• Negara	Kepala Desa dan perangkat desa	Regulasi, kontrol pada masyarakat, pengelolaan kebijakan, keuangan pelayanan	Akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan kapasitas
• Masyarakat			
• Politik	Badan Perwakilan Desa	Representasi, artikulasi, agregasi, formulasi, legislasi Sosialisasi, kontrol.	Kapasitas, akuntabilitas dan responsivitas.
•			

Lanjutan...

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Sipil•••• | Instansi sosial, organisasi sosial, warga Masyarakat. | Keswadayaan, kerjasama, gotong-royong, jaringan sosial. | Partisipasi (voice, akses dan control). |
| <ul style="list-style-type: none">• Masyarakat Ekonomi• | Pelaku dan organisasi Ekonomi. | Produksi dan distribusi. | Akses kebijakan, Akuntabilitas Sosial. |

Alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat(CBD) dalam mewujudkan Good Governance

- Pelaksanaan P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa) diseluruh daerah perdesaan di Indonesia
- Pelaksanaan Gerakan Mandiri Membangun Desa (Gemabangdesa), seperti yang telah dilakukan di Propinsi Sulawesi Tengah
- Pelaksanaan konsep IRAP (Integrated Rural Accessibility Planning).

III. KESIMPULAN

- Otonomi Daerah adalah kebijakan yang merupakan jembatan mempermudah terwujudnya Good Governance.
- Tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjamin proses kesejajaran, kesamaan dan keseimbangan peran, serta saling mengontrol yang dilakukan oleh government, sivil society, dan private sector.

Lanjutan....

- Isu-isu yang perlu diperhatikan good governance pada tingkat desa adalah:
 - Pemerintahan yang demokratis yang berasal dari partisipasi masyarakat yang dikelola secara akuntabilitas dan transparansi.
 - Hubungan antar governance di desa didasarkan pada prinsip kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan.

Terima kasih

- Joko Suyanto
- Dwi Laksmina Yunika
 - T e w u n

<http://www.ar.itb.ac.id/wdp/>